

Perlu Peningkatan Anggaran Fungsi Ketertiban & Keamanan?

HIGHLIGHT

- Tahun 2022, IEP menempatkan Indonesia pada peringkat 47 dari 163 negara dengan GPI sebesar 1,8. Hal ini berarti Indonesia dinilai tidak cukup damai karena masih banyaknya aksi demonstrasi, terorisme, tingginya angka kriminal, serta adanya ketidakstabilan politik.
- IPK Indonesia juga masih menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Namun jumlah kejahatan di Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan seiring dengan adanya peningkatan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan.
- Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan.

Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa negara memiliki empat fungsi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara tersebut dapat diterjemahkan dalam fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan.

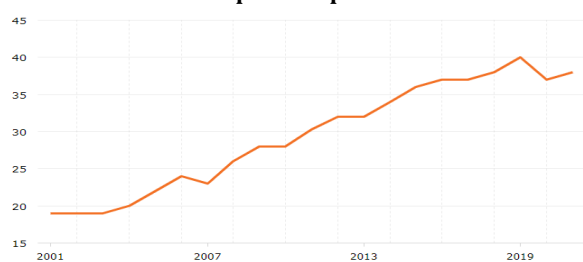
Fungsi pengaturan dan ketertiban sangat penting dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul dalam masyarakat. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan memiliki makna negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, fungsi pertahanan dan keamanan diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi keadilan memiliki makna negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikonstruksikan kepada bangsa dan negara.

Dalam klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut fungsi, fungsi ketertiban dan keamanan menjadi salah satu dari sebelas klasifikasi fungsi belanja yang dilakukan Pemerintah. Adapun fungsi ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, MA, MK RI, KY RI, Kejaksaan RI, BNPT, BIN, BNN, KPK, dan Bakamla.

Pelaksanaan Ketertiban dan Keamanan

Institute for Economic and Peace (IEP) pada tahun 2022 menempatkan Indonesia berada di peringkat 47 dari 163 negara dengan besaran skor Global Peace Index (GPI) yang diperoleh sebesar 1,8. Hal ini berarti Indonesia menempati peringkat ke-4 di Asia Tenggara. Indonesia dinilai tidak cukup damai karena masih banyaknya aksi demonstrasi, terorisme, tingginya angka kriminal, serta adanya ketidakstabilan politik.

Grafik Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2001-2021



Sumber: Transparency International Indonesia

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

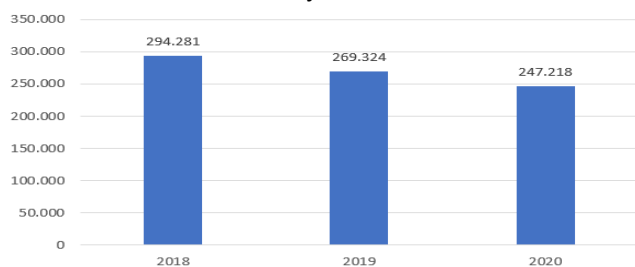
Penanggung Jawab
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:
Ratna Christianingrum · Leo Iskandar

Penulis:
Ratna Christianingrum · Leo Iskandar

Hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan skor sebesar 38. Skor yang diperoleh Indonesia masih berada di bawah IPK global, yakni sebesar 43. Selain itu skor IPK yang diperoleh Indonesia pada tahun 2022 masih belum mencapai skor IPK tertinggi yang pernah dicapai Indonesia di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan masih belum percayanya masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Grafik Jumlah Kejahatan Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan laporan Statistik Kriminal Tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah kejahatan secara nasional mengalami penurunan dalam periode tahun 2018-2020. Adapun jumlah kejahatan di sini merupakan angka keseluruhan semua jenis kejahatan tanpa membedakan derajat keseriusan suatu kejahatan.

Perkembangan Anggaran Fungsi Ketertiban & Keamanan

Grafik Perkembangan Fungsi Ketertiban dan Keamanan Tahun 2018-2023

(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan, secara nominal, menunjukkan adanya tren peningkatan sejak tahun 2018. Peningkatan nilai anggaran fungsi ketertiban apabila dibandingkan inflasi yang terjadi per tahunnya, maka pertumbuhan anggaran fungsi ketertiban masih berada di atas nilai inflasi yang terjadi.

Peningkatan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan diikuti oleh penurunan jumlah kejahatan pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan.

Anggaran TA 2023 dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2023 antara lain melalui: penanganan kejahatan konvensional, transnasional, dan pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan NKRI; penguatan prasarana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang mendukung *e-court*, *e-litigasi*, dan pengungkapan tindak pidana/kejahatan serta layanan peradilan melalui sidang di luar gedung peradilan; pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial; optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional; serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung *event* strategis. Adapun *event* strategis tersebut antara lain persiapan pemilu tahun 2024, keketuaan Indonesia di ASEAN, dan pengamanan pembangunan IKN pada tahun 2023.

Pada Nota Keuangan RAPBN TA 2023 alokasi anggaran fungsi ketertiban diperkirakan mencapai Rp 175,7 triliun. Nilai alokasi anggaran ini meningkat 1,6% dari *outlook* tahun 2022. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: pemenuhan alat material khusus (almasuk); penanganan tindak pidana umum (87 ribu perkara); penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba (20,2 ribu kasus); penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme (45 kasus); penanganan pidana siber (311 perkara); penanganan dan penyelesaian pemulihan aset terkait perkara (38 laporan); operasi intelijen kontra terorisme (1.298 operasi); serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (120 kasus).